



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

AKSELERASI KEMANDIRIAN BENIH PADI IN-SITU DI LUAR PULAU JAWA

Oleh:

D I N A

NDH: 12

**PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN X**

**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BEKERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II

Judul : Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa
Nama : Dina, S.TP., M.Si
NIP : 197504251999032001
Unit Kerja : Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

Telah diuji di depan Penguji pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024

Mentor,

Coach,

Dr. Yudi Sastro, SP., MP.
NIP 197207021998031002

Dr. Ganefo Ginting, S.T., M.M.
NIP 196407101988031001

Penguji,

Ir. Ambar Rahayu, MNS
NIP 195803061986032001

RINGKASAN EKSEKUTIF

AKSELERASI KEMANDIRIAN BENIH PADI IN-SITU DI LUAR JAWA

Ketersediaan benih padi bersertifikat belum dapat memenuhi kebutuhan sasaran tanam terutama di luar Pulau Jawa menunjukkan perlunya pembenahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan. Diperlukan strategi agar ketersediaan benih padi bersertifikat, khususnya di luar Jawa dapat ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan benih secara 6 tepat yaitu tepat varietas, jumlah, mutu, waktu, lokasi dan harga. Akar penyebab dari permasalahan kurangnya ketersediaan benih padi bersertifikat adalah keterbatasan modal produsen, kurangnya jaminan pasar benih dan kurangnya pengetahuan produsen.

Output utama dalam jangka pendek dapat tercapai yaitu terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 104/HK.310/C/9/2024 tentang Pedoman Pembinaan Produsen Benih Tanaman Pangan. Pedoman pembinaan ini merupakan keterbaruan karena sebelumnya belum ada pedoman yang mengatur kurikulum pembinaan. Selain itu, sasaran pelaksanaan pedoman di jangka menengah juga sudah disiapkan yaitu kelompok tani calon produsen benih yang melaksanakan kegiatan mandiri benih tanaman pangan tahun 2024 dan produsen benih kecil di Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan jangka menengah telah tersedia.

Penumbuhkembangan produsen benih padi in-situ sangat didukung oleh para pemangku kepentingan seperti Dinas Pertanian, petani, produsen benih dan asosiasi benih. Pedoman pembinaan yang telah disusun digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dengan tetap disesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

Permasalahan kekurangan benih padi bersertifikat selama ini diharapkan dapat diselesaikan melalui akselerasi kemandirian benih in-situ. Konsistensi pemerintah dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan pedoman, monitoring dan evaluasi yang terus-menerus dan melakukan perubahan yang diperlukan akan membuat proyek ini menjadi proyek yang berkelanjutan selama produksi benih diperlukan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt, yang telah memberikan rahmat, bimbingan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan yang berjudul Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa sekaligus menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II ini. Tema PKN II Angkatan X tahun 2024 adalah Transformasi Tata Kelola Pembangunan Pertanian untuk Peningkatan Produksi Pangan.

Proyek perubahan ini disusun sebagai strategi penyelesaian masalah keterbatasan ketersediaan benih padi bersertifikat di luar Pulau Jawa. Output utama dalam jangka pendek dapat tercapai yaitu terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Pedoman Pembinaan Produsen Benih.

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Suwandi, M.Si dan Dr. Yudi Sastro, SP., MP selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang bertindak sebagai mentor, Dr. Ganefo Ginting, S.T., M.M sebagai coach dan Ir. Ambar Rahayu, MNS sebagai penguji, atas bimbingan dan arahnya sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik;
2. Dr. Bambang Budhiyanto selaku wali angkatan, para fasilitator, narasumber dan moderator yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas ilmu yang diberikan;
3. Pimpinan dan staf BBPMKP Ciawi, atas pengaturan dan pelayanannya yang memuaskan selama PKN II ini;
4. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan dan tim pelaksana atas bantuan dan kerjasamanya;
5. Para responden dan pemangku kepentingan yang berperan serta memeberikan dukungan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini;
6. Dan teman-teman peserta PKN II Angkatan X yang sangat menyenangkan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya;

Dengan doa *Jazakumullah khairan katsiraa*.

Saran dan masukan untuk hal yang belum sempurna diharapkan agar keberlanjutan proyek perubahan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.

Wassalam

Ciawi, 10 September 2024
Penulis

Dina

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Kerangka Pikir	3
D. Manfaat	4
E. Ruang Lingkup	5
II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	6
A. Capaian Perubahan.....	6
B. Kepemimpinan Strategis	13
C. Implementasi Strategi Marketing	15
D. Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	16
E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar	18
F. Mata Pelatihan Pilihan.....	20
F. Pengembangan Potensi Diri.....	24
III. PENUTUP.....	29
A. Kesimpulan	29
B. Hikmat Pembelajaran	30
C. Rekomendasi dan Saran	31
DAFTAR REFERENSI.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian pelaksanaan proyek perubahan pada jangka pendek	7
Tabel 2. Daftar calon peserta bimbingan teknis produsen benih.....	12
Tabel 3. Progres pelaksanaan strategi peningkatan kompetensi pihak terdampak	18
Tabel 4. Bukti pelaksanaan strategi pengembangan diri	25

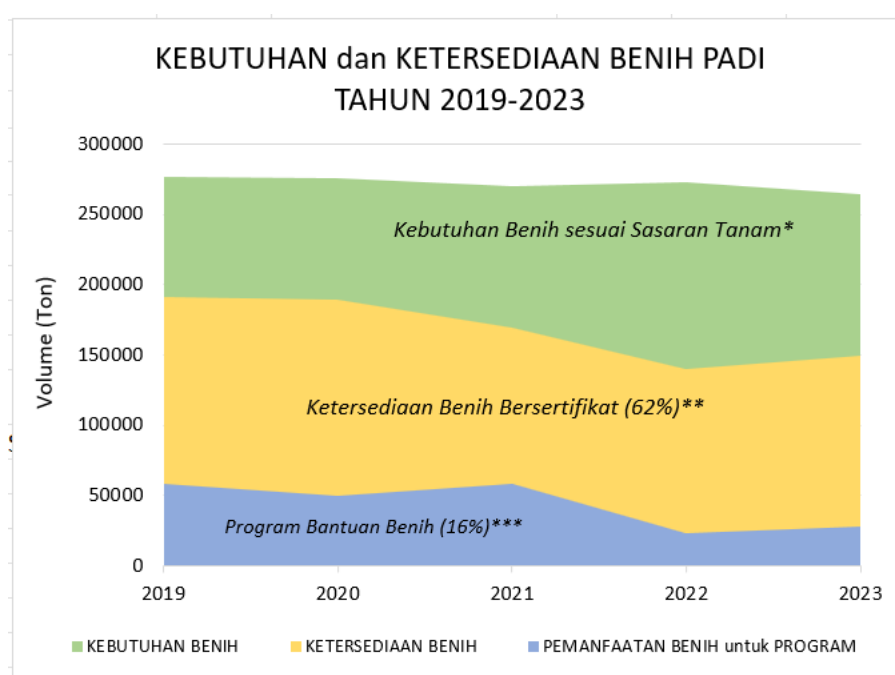
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kebutuhan dan ketersediaan benih padi bersertifikat dalam kurun waktu 2019-2023.....	1
Gambar 2. Kerangka pikir dalam menyusun proyek perubahan ‘Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa	4
Gambar 3. Penahapan kegiatan dalam proyek perubahan ‘Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa	5
Gambar 4. Halaman pertama Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 104/HK.310/C/9/2024 tentang Pedoman Pembinaan Produsen Benih Tanaman Pangan.....	6
Gambar 5. Tangkapan layar grup WA sebagai sarana komunikasi tim pelaksana proyek perubahan	9
Gambar 6. Provinsi yang mengusung kemandirian benih pada tema pameran dalam Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan IX.....	10
Gambar 7. Permintaan bimbingan teknis dari Kadis Pertanian NTT.....	13
Gambar 8. Perubahan peta stakeholder sebelum dan sesudah sosialisasi proyek perubahan.....	15
Gambar 9. Alokasi anggaran penangkaran mandiri benih dalam PAGU SBPI 2025 sebagai bukti keberlanjutan proyek perubahan	17
Gambar 10. Perbedaan tampilan data sebelum dan sesudah pembelajaran	19
Gambar 11. Peningkatan hasil penilaian pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan	28

BAB I. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Penyediaan benih padi bersertifikat belum dapat memenuhi kebutuhan benih sesuai sasaran tanam yang direncanakan Kementerian Pertanian. Rata-rata ketersediaan benih padi bersertifikat dalam lima tahun terakhir (2019-2023) baru mencapai 62% dari kebutuhan benih berdasarkan realisasasi tanam (Gambar 1). Selisih antara ketersediaan benih dan penggunaan benih sesuai realisasi tanam dipenuhi dari benih tidak bersertifikat.



Keterangan :

* Data dari KSA-BPS kecuali data tahun 2019 dari LAKIN Ditjen Tanaman Pangan

** Data rekapitulasi laporan BPSB dan LSSM, persentase rata-rata dibandingkan kebutuhan benih

*** Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan Dit.Perbenihan, persentase rata-rata dibandingkan kebutuhan benih

Gambar 1. Kebutuhan dan ketersediaan benih padi bersertifikat dalam kurun waktu 2019-2023

Berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPSB (instansi provinsi yang menangani sertifikasi dan pengawasan benih) dan LSSM (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dengan ruang lingkup benih tanaman pangan), data produksi benih padi dalam 3 tahun terakhir memperlihatkan 5 provinsi dengan produksi benih tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Persentase kontribusi rata-rata ke produksi benih

nasional berturut-turut 30,2%, 18,1%, 14,5%, 6,5% dan 5,5%. Lima provinsi selanjutnya adalah Sumatera Utara 2,7%, Kalimantan Selatan 2,4%, Sumatera Selatan 1,8%, Aceh 1,2% dan DI. Yogyakarta 1,1%. Provinsi lainnya berkontribusi kurang dari 1% dari total produksi benih padi nasional.

Data-data di atas menunjukkan produksi benih padi bersertifikat masih sangat rendah di sebagian besar luar Pulau Jawa. Pemenuhan kebutuhan benih untuk pertanaman berasal dari pasokan benih bersertifikat dari wilayah lain baik melalui *free market* maupun bantuan pemerintah atau benih tidak bersertifikat yang berasal dari panen sebelumnya. Di sini terlihat pentingnya menggerakkan produksi benih in-situ di luar Jawa untuk meningkatkan ketersediaan benih per wilayah sehingga setiap wilayah dapat menjadi mandiri benih.

Direktorat Perbenihan memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman pangan, sesuai dengan Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Adapun fungsi yang diemban dalam bidang penilaian dan pelepasan varietas, **penyediaan benih**, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan adalah (1) perumusan kebijakan; (2) pelaksanaan kebijakan; (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan (7) pelaksanaan urusan tata usaha. Penyediaan benih padi merupakan salah satu bidang yang harus ditangani Direktorat Perbenihan sesuai fungsi di atas.

Ketersediaan benih padi bersertifikat yang belum dapat memenuhi kebutuhan secara nasional dan produksi benih masih sangat rendah di sebagian besar luar Pulau Jawa menunjukkan perlunya strategi tambahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan. Diperlukan alat tambahan agar ketersediaan benih padi bersertifikat in-situ di luar Jawa dapat ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan benih secara 6 tepat yaitu tepat varietas, jumlah, mutu, waktu, tempat dan harga. Untuk itu disusun proyek perubahan ini dengan judul 'Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa'. Akselerasi ini dibutuhkan karena kegiatan untuk mendukung kemandirian benih padi sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016, tetapi belum memperoleh hasil yang optimal.

B. Tujuan

Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Meningkatkan ketersediaan benih dilakukan dengan pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih, penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan serta peningkatan penggunaan benih bersertifikat. Melihat permasalahan ketersediaan benih padi bersertifikat yang masih rendah di luar Pulau Jawa, maka tujuan proyek perubahan 'Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa' ini adalah:

1. Tujuan jangka panjang: akselerasi kemandirian penyediaan benih padi in-situ di luar Jawa sebagai wujud transformasi tata kelola pembangunan pertanian.
2. Tujuan jangka menengah: bertambahnya produsen benih padi di provinsi *pilot project* sehingga akan meningkatkan produksi benih di provinsi tersebut.
3. Tujuan jangka pendek: tersedianya pedoman bimbingan teknis untuk pembinaan produsen benih sehingga pembinaan di semua provinsi memiliki standar minimal yang sama.

Output dari proyek perubahan ini adalah pedoman bimbingan teknis untuk pembinaan produsen benih, bertambahnya produsen yang aktif memproduksi benih dan bertambahnya ketersediaan benih padi in-situ. Dengan terlaksananya proyek perubahan ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dalam bidang penyediaan benih, diharapkan ketersediaan benih padi dan akses petani terhadap benih bersertifikat di tiap wilayah akan meningkat. Proyek perubahan ini diharapkan akan memberikan dampak sebagai outcome berupa peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Dari permasalahan produksi benih padi bersertifikat yang belum dapat memenuhi kebutuhan benih termasuk untuk belanja bantuan pemerintah, maka dilakukan analisis penyebab masalah sehingga dapat ditentukan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gambaran kerangka pikir yang digunakan dalam proyek perubahan 'Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa' sebagaimana dalam Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka pikir dalam menyusun proyek perubahan ‘Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa’

D. Manfaat

Melalui proyek perubahan ‘Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa’ ini akan terjadi peningkatan akses benih bersertifikat karena adanya peningkatan produksi dan ketersediaan benih padi bersertifikat in situ. Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Perbenihan, Ditjen. Tanaman Pangan akan memiliki pedoman bimbingan teknis pembinaan produsen benih sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Pemerintah daerah yang memiliki tugas melakukan pembinaan di bidang pertanian khususnya kepada produsen benih, dapat menggunakan pedoman yang disusun Pemerintah Pusat (Direktorat Perbenihan) sehingga standar minimal pembinaan dapat terpenuhi. Pemerintah daerah juga memperoleh manfaat dalam pencapaian sasaran tanam bila telah mandiri benih.
3. Petani yang menjadi penangkar dan selanjutnya menjadi produsen benih akan memiliki usaha baru yang dapat menambah penghasilan.
4. Petani padi akan memperoleh benih bersertifikat dengan lebih mudah karena benih bersertifikat tersedia di wilayahnya, sehingga input benih bermutu sudah terpenuhi dalam usaha budidaya padi.
5. Mencegah penyebaran penyakit terbawa benih dari pulau lain karena benih tidak harus didatangkan dari wilayah lain.

6. Dari sisi efisiensi anggaran pemerintah, apabila bantuan benih padi dapat disediakan secara in-situ maka dapat dihemat biaya ongkos kirim. Biaya ongkos kirim benih padi bantuan pemerintah tahun 2023 rata-rata Rp.762/kg dengan ongkos kirim terendah Rp.400/kg dan tertinggi Rp.2.500/kg. Pada tahun 2024, biaya ongkos kirim terendah Rp. 500/kg dan tertinggi Rp.4.100/kg dengan rata-rata Rp.1.038/kg (data sementara nilai kontrak hingga 29 Agustus 2024). Dari alokasi biaya ongkos kirim yang disediakan Rp.2.400/kg untuk 12.125 ton benih (berdasarkan PAGU SPBI 2025 per Juli 2024), apabila ongkos kirim dapat ditekan hingga Rp. 500/kg sebagai akibat benih dapat tersedia in-situ maka efisiensi anggaran pemerintah pada tahun 2025 akan mencapai 79% (dari Rp. 29 miliar menjadi Rp. 6 miliar).

E. Ruang Lingkup

Proyek perubahan ini dikhususkan pada produksi benih padi bersertifikat sebagai sumber utama penyediaan benih padi yang merupakan bidang tugas Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Proyek ini juga difokuskan pada pengembangan kelembagaan produsen benih. Proyek perubahan 'Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa' dilaksanakan dalam tiga jangka waktu yang berkesinambungan yaitu bulan Juli-September 2024 untuk kegiatan jangka pendek, bulan September 2024–Agustus 2025 untuk jangka menengah dan tahun 2025-2026 untuk jangka panjang. Penahapan kegiatan sebagaimana dalam Gambar 3.

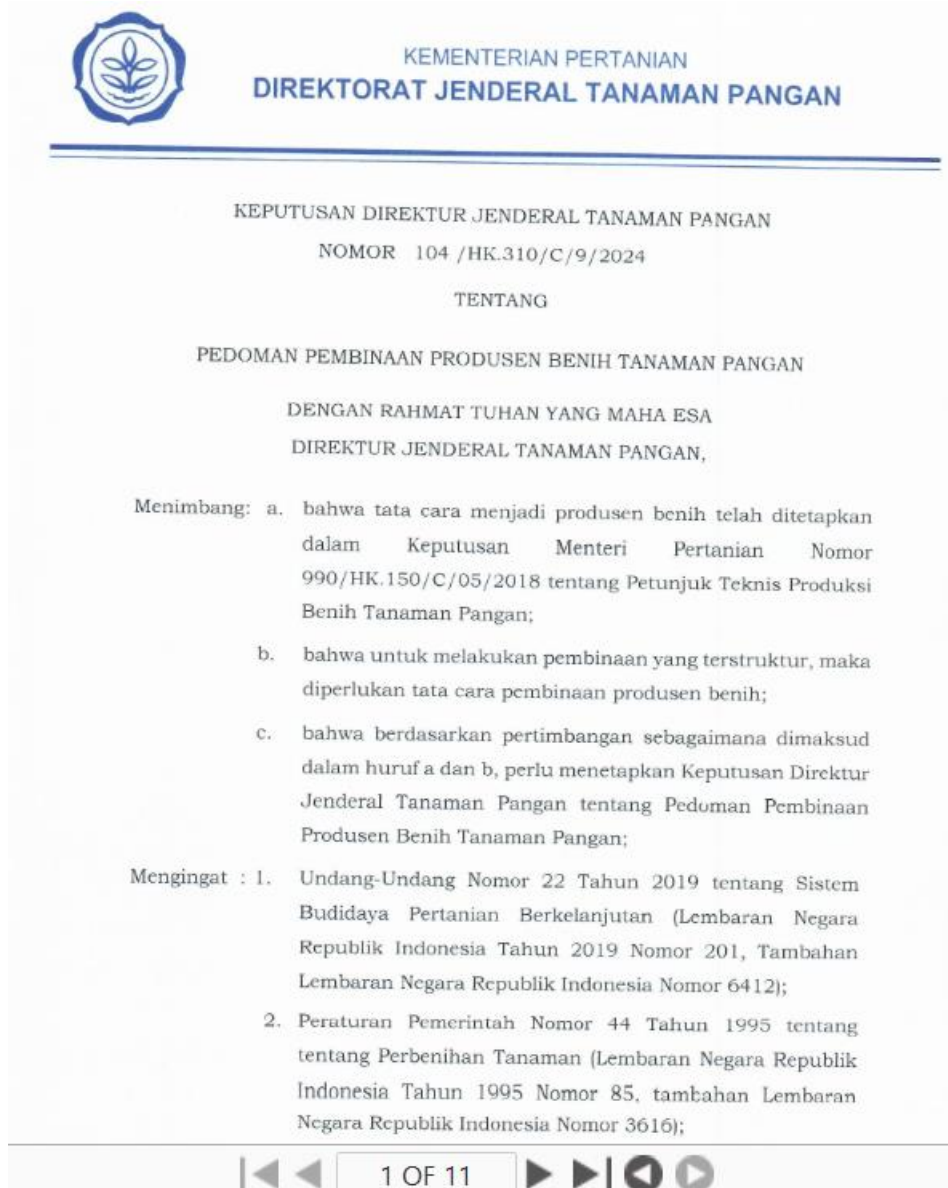


Gambar 3. Penahapan kegiatan dalam proyek perubahan 'Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa'

BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Perubahan

Output utama jangka pendek telah tercapai berupa Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 104/HK.310/C/9/2024 tentang Pedoman Pembinaan Produsen Benih Tanaman Pangan yang terbit pada 2 September 2024. Halaman pertama kepdirjen sebagaimana dalam Gambar 4 dan kepdirjen selengkapnya pada <https://bit.ly/kepdirjen-pembinaan-produsen-benih>. Pedoman pembinaan produsen benih ini sebelumnya belum ada.



Gambar 4. Halaman pertama Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 104/HK.310/C/9/2024 tentang Pedoman Pembinaan Produsen Benih Tanaman Pangan

Sesuai dengan rencana penahapan kegiatan untuk jangka pendek, seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1. Capaian pelaksanaan proyek perubahan pada jangka pendek

No	Kegiatan	Output	Status	Bukti
1.	Penetapan tim	Penugasan Direktur Perbenihan tentang Tim Pelaksana Proyek Perubahan (PP)	Selesai	Surat penugasan No. 1835/TU.040/C.2/07/2024 (https://bit.ly/surat-tugas-tim-pelaksana)
2.	Diskusi rencana kerja	Pembagian tugas	Selesai	Foto rapat tim dan diskusi di WAG (https://bit.ly/diskusi-dit-benih-dan-tim)
3.	Pengumpulan bahan penyusunan pedoman	Hasil kuisiner dan diskusi	Selesai	Rekapitulasi hasil kuisiner dan hasil diskusi (https://bit.ly/kuesioner-dan-diskusi)
4.	Penyusunan draft pedoman bimtek	Draft pedoman bimtek	Selesai	Draft yang dibahas di WAG bersama tim pelaksanaan (https://bit.ly/draft-pedoman-awal-kepdiren)
5.	Pembahasan draft bersama tim reviu peraturan	Draft pedoman bimtek yang disempurnakan	Selesai	Draft yang dibahas di WAG dan zoom meeting bersama tim reviu (https://bit.ly/draft-kepdiren-22-agustus)
6.	Finalisasi pedoman	Draft pedoman bimtek dalam format SK Dirjen	Selesai	Draft Kepdiren yang diusulkan ke Setditjen (https://bit.ly/draft-kepdiren-2-september)
7.	Inventarisasi CPCL di Babel dan Sulut	CPCL pilot project	Selesai	Daftar poktan pelaksana mandiri benih tahun 2024 sebagai calon peserta bimtek produsen benih (Tabel 2)
8.	Penyusunan laporan	Laporan hasil proyek perubahan	Selesai	

1. Penetapan Tim Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan jangka pendek dimulai dengan penetapan tim pelaksana oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan. Anggota tim ditentukan berdasarkan kesesuaian antara proyek perubahan ini dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar tim pelaksana dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

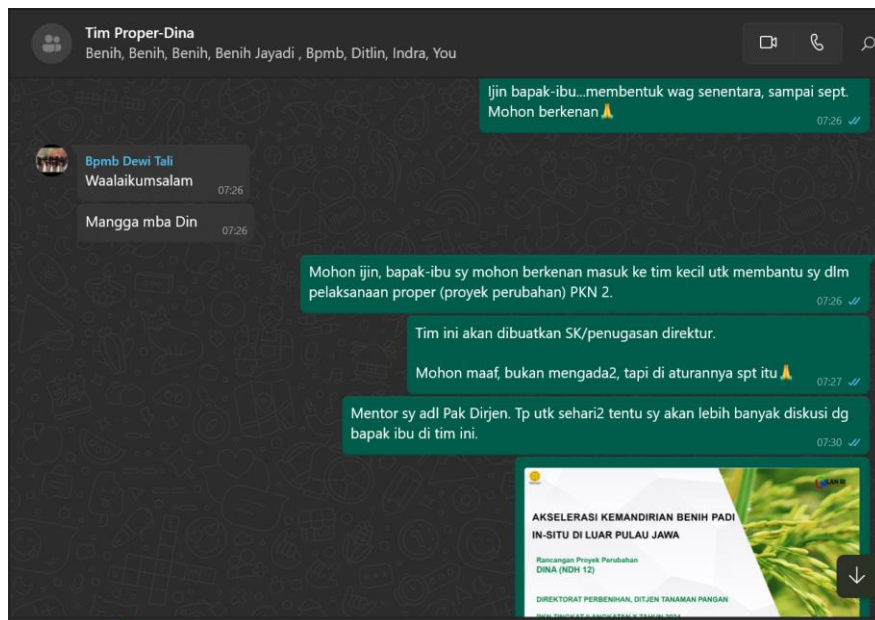
Tantangan yang dihadapi adalah pengaturan kerja tim dalam melaksanakan proyek perubahan ini. Direktorat Perbenihan memiliki agenda event nasional yaitu Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan IX di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dilaksanakan pada 27-29 Juli 2024. Seluruh personel Direktorat Perbenihan, tidak terkecuali tim pelaksana proyek perubahan menjadi panitia inti dalam event tersebut. Dapat dikatakan sejak minggu ke-2 Juli hingga selesainya acara Gebyar, tim pelaksana fokus pada persiapan dan pelaksanaan Gebyar. Untuk itu dibutuhkan manajemen waktu dan koordinasi yang baik untuk dapat melaksanakan tugas yang utama, persiapan Gebyar dan tugas pelaksanaan proyek perubahan.

Salah satu antisipasi yang dilakukan adalah pemilihan tahapan kegiatan jangka pendek yang diperhitungkan dapat terlaksana dengan baik disela-sela persiapan Gebyar. Contoh kegiatan tersebut adalah penyebaran kuisisioner yang dilakukan di lokasi Gebyar, mensosialisasikan penggunaan benih bersertifikat dengan stiker yang dibagikan gratis dan memotret dukungan kemandirian benih.

Tim pelaksana proyek perubahan ini juga melibatkan ketua kelompok substansi (kapoksi) dan ketua tim kerja (katimker) yang memiliki banyak tugas utama. Kapoksi dan katimker dilibatkan dalam tim pelaksana karena dibutuhkan perannya untuk mengkaitkan dengan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkoordinir sumber anggaran kegiatan. Sebagai fungsional murni yang tidak memegang tugas manajerial tetapi harus memimpin tim pelaksana, maka komunikasi dalam tim lebih bersifat koordinatif (bukan perintah).

Dalam menyelesaikan tantangan koordinasi tim, maka dibentuk WA grup untuk menjembatani keterbatasan waktu dan tempat (Gambar 5). Untuk kelancaran pelaksanaan proyek perubahan, maka dilakukan pembagian tugas disesuaikan dengan tugas sehari-hari yang melekat, sebagai berikut:

Sekretariat : Virda Aziza, S.P. (Pelaksana)
Pengolahan data & dokumentasi: Sofiana Rahmayani, S.P. (PBT Pertama)
Penerapan proyek dan CPCL : Sujayadi, S.P., M.P. (Katimker)
Perhitungan aspek ekonomis : Achmad, S.P. (Katimker)
Evaluasi dan rekomendasi : Abriani Fensionita, S.P., M.Si (Kapoksi)
Ir. Dewi Taliroso, M.Si (PBT Madya)
Penyediaan anggaran : Indra Rochmadi, S.Pi., M.Si (Koordinator
Perencanaan)



Gambar 5. Tangkapan layar grup WA sebagai sarana komunikasi tim pelaksana

2. Pengumpulan bahan dan informasi

Memasarkan proyek perubahan ini dengan tagline 'AYO MENJADI PRODUSEN BENIH PADI' tidak sulit. Melalui penyebaran kuisioner yang diisi oleh total 209 responden (76 perwakilan dinas pertanian provinsi dan kabupaten, 62 petani, 61 produsen benih dan 10 orang mewakili asosiasi benih), sebanyak 99% menyatakan setuju dan mendukung proyek 'AYO MENJADI PRODUSEN BENIH PADI' dilaksanakan di wilayahnya masing-

masing (<https://bit.ly/kuesioner-dan-diskusi>). Hal ini menunjukkan produksi benih in-situ merupakan harapan untuk mewujudkan kemandirian benih. Dua provinsi yang mengusung tema kemandirian benih dalam booth pameran di Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan IX adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan (Gambar 6).



Gambar 6. Provinsi yang mengusung kemandirian benih pada tema pameran dalam Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan IX

3. Penyusunan pedoman pembinaan produsen benih

Tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah proses penyusunan pedoman pembinaan produsen benih. Diperlukan penyesuaian cara pandang dalam melihat isi draft pedoman pembinaan yang disusun. Diskusi pertama dengan tim review peraturan perbenihan melalui percakapan di grup WA dilakukan untuk membahas layout pedoman. Dari diskusi awal ini diperoleh masukan-masukan tentang hal apa saja yang perlu dimasukkan dalam pedoman pembinaan.

Pedoman yang disusun harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi perbenihan masih banyak yang menggunakan aturan yang diterbitkan tahun 2018, sebagai akibat pembaharuan yang telah disusun belum diterbitkan. Regulasi perbenihan tahun 2018 tersebut pada beberapa hal berbeda dengan aturan baru. Sebagai contoh izin produsen benih dalam Kepmentan 990/2018 berbeda dengan perijinan berusaha dalam Permentan 15/2021. Perbedaan-perbedaan ini yang menjadi perhatian tim review dalam merumuskan pedoman pembinaan produsen benih.

Setelah draft awal disusun bersama tim pelaksana (draft awal dalam <https://bit.ly/draft-pedoman-awal-kepdirjen> dan <https://bit.ly/draft-kepdirjen-22-agustus>), selanjutnya dikirim ke grup WA tim reviu untuk dibahas secara virtual melalui zoom meeting pada 26 Agustus 2024 (undangan dan daftar hadir pada <https://bit.ly/undangan-pembahasan-26-agustus>). Tim reviu peraturan perbenihan merupakan tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan melalui keputusan nomor 20/HK.310/C/2/2023 tanggal 1 Pebruari 2023 (susunan tim reviu dalam <https://bit.ly/sk-tim-reviu>). Anggota tim reviu adalah Pengawas Benih Tanaman (PBT) dari berbagai provinsi yang dipilih berdasarkan kompetensi.

Tanggapan awal untuk draft pedoman yang disusun adalah pedoman terlalu rumit dan tidak jelas, terlebih pada klausul tentang penggolongan usaha perbenihan dan pembahasan aspek permodalan. Menurut sebagian besar tim reviu, terkait golongan usaha dan besaran modal bukan dalam ranah pembinaan yang dilakukan oleh PBT. Selain itu tentang tata cara memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar juga diusulkan tidak perlu dimasukkan dalam pedoman karena sudah ada dinas lain yang menangani hal tersebut.

Setelah dijelaskan kembali latar belakang dan tujuan penyusunan pedoman ini, kemudian disepakati dua alternatif judul pedoman yaitu menjadi Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Produsen Benih atau tetap pada judul semula tetapi fokus pada pembinaan dan penjelasan yang sudah dimasukan dalam draft pedoman menjadi isi materi dalam kurikulum pembinaan. Tangkapan layar sebagian diskusi di grup WA Tim Reviu Perbenihan sebagaimana pada <https://bit.ly/tangkapan-layar-diskusi-wag>.

Setelah memperoleh masukan, selanjutnya tim pelaksana membuat perbaikan yang diperlukan dan diputuskan pedoman fokus pada pembinaan dengan rincian silabus materi. Draft pedoman didiskusikan kembali di grup WA tim reviu untuk disepakati, kemudian diproses untuk diterbitkan dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Draft kepdirjen disampaikan oleh Direktur Perbenihan melalui nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal untuk diproses lebih lanjut <https://bit.ly/draft-kepdirjen-2-september>).

4. Inventarisasi calon peserta bimbingan teknis

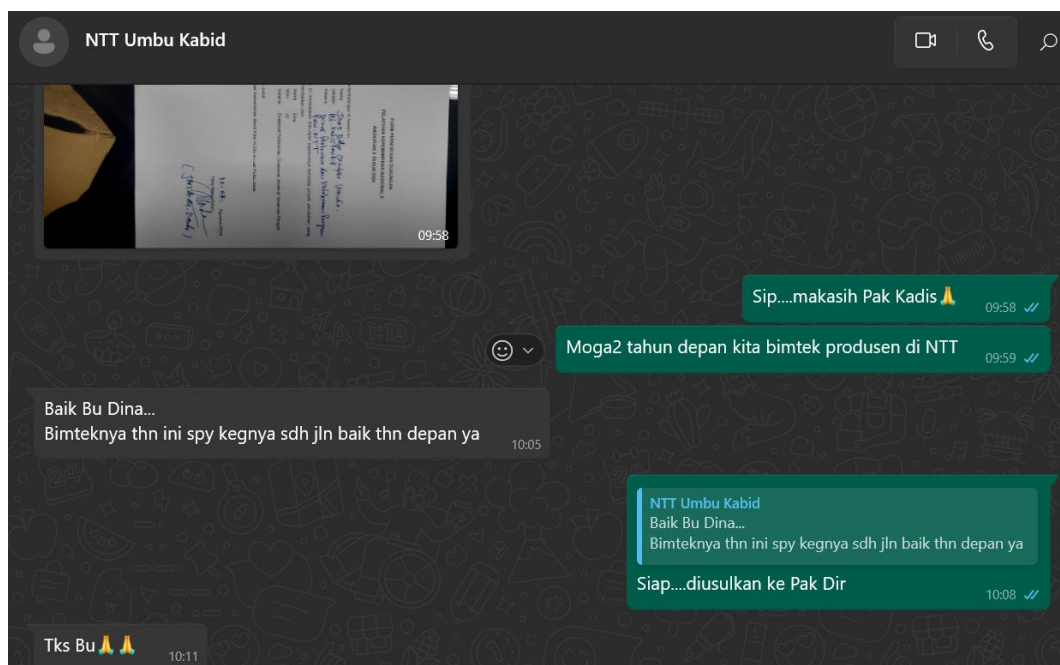
Inventarisasi calon peserta bimbingan teknis diperlukan untuk persiapan pelaksanaan bimbingan teknis. Diperoleh 34 kelompok tani calon peserta bimbingan teknis (Tabel 2).

Tabel 2. Daftar calon peserta bimbingan teknis produsen benih

No.	Provinsi/Kabupaten	Kelompok Tani
A	Kep. Bangka Belitung	
1	Bangka Selatan	Poktan Marsudi Tani 3
2	Bangka Selatan	Poktan Harapan Sentosa
3	Bangka Selatan	Kelompok Tani Perintis Jaya 1
4	Bangka Selatan	Kelompok Tani Perintis Jaya 3
5	Bangka Selatan	Gapoktan Serdang Bersatu
6	Bangka Selatan	PP Mulya Makmur
7	Bangka Tengah	Kelompok Tani Pacir Jaya 2
8	Bangka	Gapoktan Usaha Tani Bersama
9	Bangka	Gapoktan Benoa Cemerlang
10	Belitung Timur	Poktan Harapan Bersama
11	Bangka Barat	Gapoktan Pakat
12	Belitung	Poktan Kelubi Makmur
B	Sulawesi Utara	
13	Minahasa Tenggara	Poktan Makapihok
14	Minahasa Tenggara	Poktan Tekad Bersama
15	Minahasa Tenggara	Poktan Mapalus
16	Minahasa Selatan	Poktan Waraney
17	Minahasa Selatan	Poktan Berdikari
18	Minahasa Selatan	Poktan Blessing
19	Kota Tomohon	Poktan Maju Bersama
20	Kota Tomohon	Poktan Makaaruyen
21	Minahasa	Poktan Goro
22	Minahasa	Poktan Sejati
23	Minahasa	Poktan Lepo Weru
24	Minahasa	Poktan Anugerah
25	Minahasa	Poktan Kamangen
26	Minahasa	Poktan Wetes
27	Minahasa	Poktan Pinasungkulanta
28	Bolaang Mongondow Utara	Poktan Indah Solo 1
29	Bolaang Mongondow Utara	Poktan Hidup Baru Pontak
30	Bolaang Mongondow Utara	Poktan Mandir II
31	Bolaang Mongondow Utara	Poktan Tote Tontulow Utara
32	Minahasa Utara	Poktan Kyrios
33	Minahasa Utara	Poktan Mauma
34	Minahasa Utara	Usaha Makmur

5. Persiapan pelaksanaan kegiatan jangka menengah.

Selain pencapaian di atas, untuk kegiatan jangka menengah juga sudah disiapkan pelaksanaan kegiatan penerapan pedoman pembinaan produsen benih. Telah disusun kerangka acuan kerja bimbingan teknis produsen benih di Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Utara dan telah disetujui oleh Direktur Perbenihan (sebagaimana pada <https://bit.ly/nodin-usulan-bimtek>). Bimbingan teknis direncanakan akan dilaksanakan pada akhir September dan pertengahan Oktober 2024. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT juga meminta diselenggarakan bimbingan teknis produsen di NTT pada tahun 2024 ini (Gambar 7).



Gambar 7. Permintaan bimbingan teknis dari Kadis Pertanian NTT

B. Kepemimpinan Strategis

1. Kepemimpinan kewirausahaan

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah anggaran kegiatan yang direncanakan dalam proyek perubahan belum tersedia secara khusus dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun 2024. Kegiatan utama dalam proyek perubahan ini setelah menyusun pedoman pembinaan adalah implementasi penggunaan pedoman tersebut di dua provinsi *pilot project* yaitu Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Sulawesi Utara (Sulut). Sesuai dengan penahapan kegiatan, pada jangka

menengah akan dilaksanakan implementasi pedoman pembinaan produsen benih berupa bimbingan teknis selama 3 hari yang diperkirakan memerlukan biaya penyelenggaraan sekitar 100 juta rupiah per provinsi untuk 20 orang peserta. Biaya tersebut meliputi biaya perlengkapan bimbingan teknis, konsumsi, akomodasi, perjalanan dan honor narasumber.

Untuk mengatasi masalah anggaran tersebut, telah diusulkan kepada Direktur Perbenihan untuk dapat memanfaatkan anggaran pembinaan yang tersedia di POK Direktorat Perbenihan guna pelaksanaan bimbingan teknis di dua provinsi tersebut. Mata pembelajaran kepemimpinan kewirausahaan memberikan pengayaan cara berpikir agar seorang pemimpin kreatif dan solutif dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

2. Kepemimpinan digital

Penggunaan sarana grup WA, zoom meeting dan kuis online melalui googleform serta lampiran laporan dalam bit.ly merupakan salah satu penerapan kepemimpinan digital, meskipun dalam tingkat yang paling sederhana. Pemanfaatan teknologi ini terbukti dapat diandalkan untuk koordinasi, diskusi, sosialisasi dan menjangkau informasi, bahkan untuk *mentoring* dan *coaching*. Bimbingan teknis secara hybrid kombinasi pertemuan luring dan daring juga dapat menjadi pilihan untuk efisiensi waktu dan biaya.

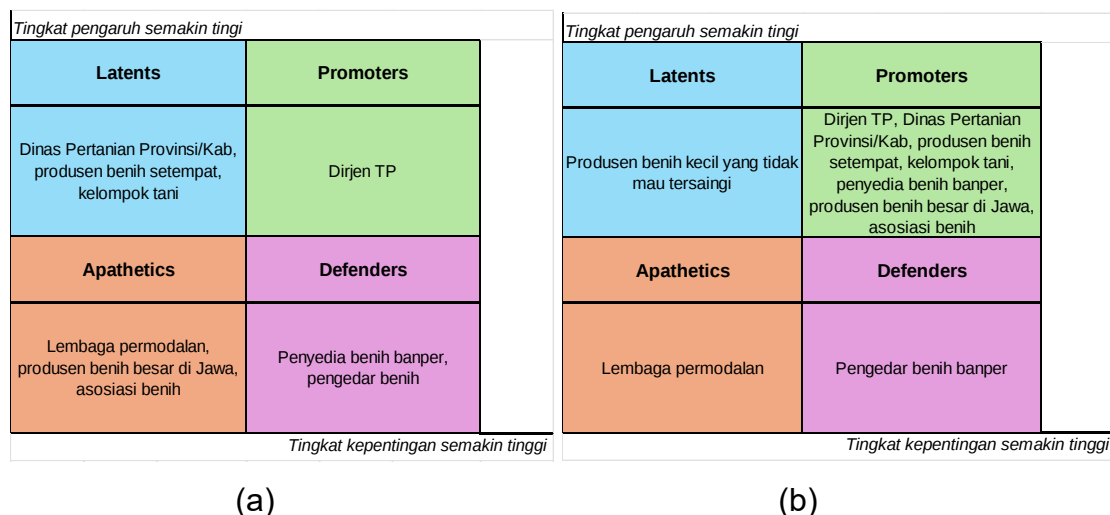
3. Organisasi pembelajar

Proyek perubahan ini juga merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan organisasi pembelajar. Melalui diskusi dalam tim pelaksana dan kelompok substansi, terjadi transfer informasi dan pengetahuan. Sebagai contoh materi Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi dibagikan ke tim pelaksana dan anggota substansi Penyediaan dan Pemanfaatan Benih (P2B) sebagai bahan renungan anggota kelompok atas gap yang terjadi akibat perbedaan umur. Anggota kelompok P2B terdiri dari generasi X (kelahiran tahun 1965-1980), generasi milenial (kelahiran tahun 1980-1995) dan generasi Z (kelahiran tahun 1997-2021).

Beberapa kali perselisihan terjadi dikarenakan gap tersebut khusus perselisihan terkait pemanfaat teknologi baru. Generasi X khususnya yang berumur lebih dari 50 tahun tidak terbiasa menggunakan googlespreadsheet, atau pengumpulan file dalam link bit.ly, dua hal yang paling sering digunakan oleh generasi Z untuk efektivitas pengumpulan data dan pelaporan. Melalui materi Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi yang dibagikan, masing-masing generasi diharapkan saling memahami dan saling menyesuaikan.

C. Implementasi Strategi Marketing

Pola komunikasi yang diterapkan kepada stakeholder sesuai tingkat pengaruh dan kepentingan kepada proyek perubahan ini. Hasil dari komunikasi yang diterapkan adalah perubahan peta stakeholder sebagaimana dalam Gambar 8.



Gambar 8. Perubahan peta stakeholder sebelum (a) dan sesudah (b) sosialisasi proyek perubahan

Kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi selalu diberikan informasi tentang hasil kegiatan, sehingga beliau memberikan evaluasi dan selalu mendukung. Komunikasi dengan mentor dilakukan secara langsung maupun melalui percakapan WA sebagaimana dalam <https://bit.ly/kartu-kendali-mentoring>. Adanya perubahan pejabat Direktur Jenderal tidak mempengaruhi alur informasi proyek perubahan ini karena pejabat Direkktur Jenderal yang baru sebelumnya menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sehingga telah terinformasi tentang kegiatan PKN II dan proyek perubahan ini. Selain itu, beliau

sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Direktur Perbenihan, sehingga sangat memahami proyek perubahan ini.

Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten termasuk perangkatnya dan kelompok tani yang sebelumnya berada di kuadran latents, melalui sosialisasi dalam kuisisioner dan diskusi baik secara khusus maupun tidak, berhasil menjadi kelompok yang mendukung (promoters) dilihat dari hasil kuisisioner yang dibagikan dan pernyataan dukungan dalam <https://bit.ly/pernyataan-duktangan-kadis>. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan dalam suatu pertemuan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara kepada para Kepala Bidang Tanaman Pangan yang menangani produsen benih padi di Provinsi Sulut (<https://bit.ly/sosialisasi-produsen-benih>).

Produsen benih besar di Pulau Jawa dan asosiasi benih, memiliki kepentingan dan pengaruh rendah karena kegiatan akan difokuskan di luar Pulau Jawa, tetapi melalui pengisian kuisisioner terlihat mendukung proyek perubahan ini. Bahkan Sipetapa (salah satu asosiasi benih di Jawa Barat) mengusulkan dibentuknya konsultan benih yang berisi para produsen benih besar untuk menjadi anggota tim pelatih atau tim konsultan yang memberikan pelatihan bagi para petani calon produsen maupun produsen benih kecil di luar Pulau Jawa. Hal yang penting digerakkan selain aspek teknis adalah jiwa kewirausahaan. Direncanakan Bapak Ridwan Heri sebagai salah satu pengurus Sipetapa akan menjadi narasumber dalam bimbingan teknis.

Pengedar atau distributor benih khusus benih bantuan pemerintah direncanakan akan diberikan informasi hasil kegiatan terlebih dahulu agar dapat memanfaatkan hasil kegiatan ini, sehingga selanjutnya dapat mendukung sepenuhnya kemandirian benih padi di tiap provinsi. Sebagian besar distributor ini juga berada dari Pulau Jawa.

D. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Untuk pelaksanaan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang diperlukan adanya kegiatan yang mendukung penumbungkembangan produsen benih. Untuk menunmbuhkembangkan produsen benih di luar Pulau Jawa stimulasi melalui bantuan pemerintah masih diperlukan. Berdasarkan pagu indikatif yang disusun setelah diterbitkannya SPBI (Surat Bersama Pagu Indikatif tahun

2025 yang diterbitkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 dan Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.02/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, telah dialokasikan anggaran di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk mendukung kegiatan penumbuhkembangan produsen benih (Gambar 9).

Kode	Program / Kegiatan / KRO / RO	SBPI PASCA RAKOR 18 MEI 2024 TA. 2025 DITJEN TP		
		Volume	Satuan	Alokasi (Rp. 000)
018.03	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan			1.021.026.273
018.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			733.163.989
4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			50.509.690
4579.AEA	Koordinasi			3.628.222
4579.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan	1	Kegiatan	3.628.222
4579.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			1.000.000
4579.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman	4	NSPK	1.000.000
4579.PDC	Sertifikasi Produk			9.000.000
4579.PDC.001	Sertifikat Benih padi	10.000	Produk	5.000.000
4579.PDC.002	Sertifikat Benih jagung	3.000	Produk	1.500.000
4579.PDC.003	Sertifikat Benih kedelai	2.000	Produk	1.000.000
4579.PDC.004	Sertifikat Benih aneka umbi	1.000	Produk	500.000
4579.PDC.005	Sertifikat Benih Aneka Kacang	2.000	Produk	1.000.000
4579.QKB	Pemantauan produk			6.258.000
4579.QKB.001	Peredaran Benih Tanaman Pangan yang Diawasi	32	Laporan	6.258.000
4579.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			28.608.280
4579.RAI.011	Penyediaan Benih Sumber Padi	221	Hektar	5.967.000
4579.RAI.013	Penyediaan Benih Sumber Kedelai	70	Hektar	1.765.400
4579.RAI.014	Penyediaan Benih Sumber Kacang Tanah	30	Hektar	942.690
4579.RAI.015	Penyediaan Benih Sumber Kacang Hijau	30	Hektar	776.190
4579.RAI.016	Penyediaan Benih Sumber Ubi Kayu	16	Hektar	480.000
4579.RAI.018	Penangkaran Mandiri Benih	1.900	Hektar	18.677.000
4579.SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa			2.015.188
4579.SDB.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	5	purwarupa	2.015.188

Gambar 9. Alokasi anggaran penangkaran mandiri benih dalam PAGU SBPI 2025 sebagai bukti keberlanjutan proyek perubahan

Pada program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan telah dialokasikan anggaran untuk penangkaran mandiri benih in-situ seluas 1.900 ha. Luasan tersebut merupakan tambahan areal penangkaran benih. Dengan asumsi dihasilkan benih padi sebanyak 3 ton/ha, maka akan dihasilkan tambahan produksi benih sebanyak 5.700 ton yang selanjutnya dapat digunakan untuk pertanaman konsumsi seluas 228.000 ha.

Selain dukungan alokasi anggaran untuk penangkaran benih in-situ diperlukan pula anggaran untuk pembinaan petani calon produsen benih dan produsen benih itu sendiri. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas (Jarot Indarto, SP., MT., M.Sc., Ph.D) telah memberikan dukungannya untuk proyek perubahan ini

dengan saran kemandirian benih ditempatkan pada konteks wilayah/region yang lebih detil, demikian pula dukungan dari Inspektur 2 sebagai pimpinan inspektorat untuk Ditjen. Tanaman Pangan (pernyataan dukungan sebagaimana dalam <https://bit.ly/pernyataan-dukkungan->.

E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, pihak terdampak yang terlibat adalah anggota tim dan beberapa stakeholder (pemangku kepentingan). Pihak terdampak ini perlu pula memperoleh peningkatan kompetensi sehingga memperoleh manfaat yang optimal dari pelaksanaan proyek perubahan ini. Hasil dari strategi pengembangan kompetensi bagi pihak terdampak sebagaimana dalam Tabel 3.

Tabel 3. Progres pelaksanaan strategi peningkatan kompetensi pihak terdampak

No.	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Perlu Ditingkatkan	Strategi	Hasil/ Progres
1.	Peserta PKN (saya)	Berpikir komprehensif diawali dengan <i>helicopter view</i> dan mengajak tim untuk bergerak bersama	Diskusi dengan pimpinan, tim perencanaan dan membangun kebersamaan tim	Selalu dalam proses belajar
2.	Anggota Tim	Memanfaatkan data sebagai sarana pemecahan masalah dan promosi kinerja institusi	Diskusi dan share materi PKN yang diperlukan	Perbaikan dalam pembuatan bahan tayang pimpinan
3.	Bidang Tanaman Pangan	Kemampuan membina produsen benih	Menggunakan pedoman bimtek sebagai <i>tools</i>	Dinas menyatakan pedoman akan sangat membantu
4.	Kelompok tani	Menjadi produsen benih	Bimtek dan bantuan pemerintah	Bantuan pemerintah sudah, Bimtek belum diselenggarakan
5.	Petani	Membaca label benih	Sosialisasi	Sudah, tetapi baru di Sulut

Pembelajaran untuk anggota tim, khususnya yang sering diberi tugas untuk membuat bahan tayang untuk pimpinan adalah cara penyajian data. Sebelumnya sering sekali data excel ditampilkan apa adanya dalam tayangan atau yang dikirim ke pimpinan (Gambar 10a). Sebagai salah satu sarana marketing sektor publik, tayangan yang menarik dan mudah dipahami merupakan salah satu cara agar program pemerintah memperoleh dukungan yang memadai. Untuk itu tim diarahkan menggunakan peta sebagaimana Gambar 10b. Hal ini juga sangat disetujui oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan sebagai pihak yang paling sering menggunakan bahan tayang.



Gambar 10. Perbedaan tampilan data sebelum dan sesudah pembelajaran

Pembelajaran lain adalah terkait penggunaan pedoman pembinaan produsen benih. Pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2024 dilakukan sosialisasi draft pedoman pembinaan produsen benih di Provinsi Sulawesi Utara (<https://bit.ly/sosialisasi-produsen-benih>), khususnya kepada para Kepala Bidang Tanaman Pangan yang menangani produsen benih padi. Para kepala bidang menyampaikan pedoman pembinaan produsen akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pembinaan. Untuk itu diusulkan untuk diselenggarakan TOT (Training of Trainer) bagi personel dinas yang bertugas melakukan pembinaan produsen benih, atau diikutsertakan dalam bimbingan teknis bersama-sama dengan produsen benih.

Dalam wawancara dengan Kelompok Tani Kyrios di Minahasa Utara, Kelompok Tani Makapihok di Minahasa Tenggara, Kelompok Tani Goro di Minahasa dan Kelompok Tani Maju Bersama di Tomohon, para ketua kelompok tersebut menyatakan para petani belum melihat label atau isi label dalam memilih benih yang akan dibeli atau ditanam. Sosialisasi lebih menekankan agar para ketua kelompok tani menunjukkan pertamanan yang memuaskan bila menggunakan

benih bersertifikat (video wawancara sebagaimana pada <https://bit.ly/wawancara-produsen-benih> dan foto kunjungan dalam <https://bit.ly/sosialisasi-produsen-benih>).

F. Mata Pelatihan Pilihan

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini, telah dipelajari tiga mata pelatihan pendukung yang disediakan di <https://linktr.ee/simanpim.bbpmkp>. Digunakan pola pembelajaran mandiri untuk mempelajari mata pelatihan pilihan ini dan selanjutnya diimplementasikan dalam proyek perubahan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Secara ringkas, tiga mata pelatihan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pemerintah

Materi pelatihan ini memberi pengetahuan tentang implementasi fungsi manajemen dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan, hal hal yang dibahas mulai konsep Dasar Manajemen Pemerintahan, Manajemen Dalam Organisasi Pemerintahan, hingga Manajemen Pemerintahan Era Revolusi Industri 4.0. Materi ini sangat mendukung perencanaan kegiatan dalam proyek perubahan ini mengingat di dalamnya menjelaskan pula pola hubungan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam proses menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan 6 M alat manajemen (*men, materials, machine, methods, money, market*). Dalam proses menggerakkan sumberdaya, manajemen melakukannya melalui pelaksanaan fungsi POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*). Fungsi POAC tersebut diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dengan kata lain, manajemen pemerintahan adalah kegiatan atau proses dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan yang diberikan negara untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dikuasai negara.

Di dalam manajemen organisasi pemerintahan, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu (1) urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya pusat): politik LN, pertahanan, keamanan, yustisi, meoter fiskal nasional, agama; (2)

urusan konkuren (dibagi pusat, provinsi dan kab/kota): wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan (termasuk di dalamnya pertanian); (3) urusan umum (kewenangan presiden): pelaksanaan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, penanganan konflik sosial dan koordinasi antar instansi. Penyediaan benih termasuk dalam urusan pertanian yang menjadi urusan konkuren pilihan bagi pemerintah daerah. Urusan pertanian selalu menjadi pilihan bagi pemerintah daerah, hal ini ditunjukkan dengan di semua provinsi di Indonesia selalu ada dinas pertanian (dengan nomenklatur masing-masing).

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi, bukan kemerdekaan tetapi kebebasan/kemandirian yang bertanggungjawab. Dalam pelimpahan kewenangan, terdapat 3 asas yaitu (1) desentralisasi dimana urusan pemerintahan dari pusat diserahkan ke daerah otonom; (2) dekonsentrasi, dimana pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (urusan absolut) diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; (3) tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait dengan pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah pusat tetap bertugas untuk melaksanakan pembinaan. Bentuk pembinaan dan pengawasan dapat berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan. Penyusunan pedoman pembinaan produsen benih oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan sebagai instansi pusat untuk dapat digunakan oleh pemerintah daerah, merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan.

Di era revolusi 4.0 ini, penerapan manajemen pemerintahan harus memanfaatkan jaringan/koordinasi antar pemangku kepentingan, kerjasama dan cinta produk dan jasa bermutu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah otonomi daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangannya masing-masing. Penggunaan teknologi otomatisasi dan cyber digunakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan mutu fungsi

pemerintahan. Peluang menyelenggarakan pembinaan produsen secara hybrid kombinasi luring dan daring merupakan salah satu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah.

2. Pengawasan Berbasis Risiko

Prinsip pengawasan berbasis risiko dan mekanisme pelaksanaan pengawasan terintegrasi di Indonesia serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan ini. Mata pelatihan pilihan ini diperlukan karena dalam pembentukan usaha perbenihan diperlukan pula izin berusaha sesuai dengan PP No. 5 tahun 2021 dan Permentan 15/2021. Proses perizinan berusaha ini menjadi salah satu materi dalam pembinaan produsen benih.

Prinsip dalam pengawasan berbasis risiko adalah *trust but verify*, artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dengan mempermudah proses perizinan sesuai dengan tingkat risiko usaha, dan selanjutnya Pemerintah melakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan kewajiban pelaku usaha serta mengumpulkan bukti pelanggaran (bila ada) akan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan bahaya lainnya. Prinsip pengawasan yang dapat diterapkan dalam pembinaan produsen benih antara lain:

- a. Pengawasan dilaksanakan secara random inspection dan bukan blanket inspection;
- b. Frekuensi pengawasan sesuai dengan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan;
- c. Pengawasan rutin melalui pelaporan dan inspeksi lapangan, dan pengawasan insidentil dalam bentuk inspeksi lapangan berdasarkan pengaduan atau kebutuhan tertentu;
- d. Pelaksana pengawasan adalah pemerintah pusat dan pemda.

Dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), sesuai Permentan 15/2021 usaha perbenihan dalam kategori usaha kecil dan usaha menengah memiliki risiko usaha menengah rendah, sedangkan pada kategori usaha menengah dan usaha besar memiliki risiko menengah tinggi. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI), untuk usaha perbenihan tanaman pangan menggunakan kode KBLI sebagai berikut:

- A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- 01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI
- 011 Pertanian Tanaman Semusim
- 0111 Pertanian serealia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak
- 0112 Pertanian Padi
- 0113 Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi

Contoh pada pertanian padi:

- 01121 Pertanian Padi Hibrida
- 01122 Pertanian Padi Inbrida

Ruang Lingkup: Usaha perbenihan padi inbrida

Setelah mempelajari PP 5/2021 dan Permentan 15/2021, terdapat aturan dalam Kepmentan 990/2018 yang harus disesuaikan yaitu pada persyaratan pendaftaran produsen benih ke instansi provinsi yang menangani sertifikasi dan pengawasan benih (BPSB). Calon produsen benih harus memiliki NIB terlebih dahulu sebelum mendaftar ke BPSB dan selanjutnya BPSB menerbitkan keterangan kelayakan sebagai produsen benih, bila calon produsen tersebut layak. Untuk skala usaha menengah dan besar, keterangan kelayakan sebagai produsen benih harus diterbitkan oleh BPSB sebelum calon produsen benih memperoleh sertifikat standar dari sistem OSS-RBA. Hal ini menjadi bagian dalam materi pembinaan produsen benih yang disusun dalam proyek perubahan ini.

3. Diagnosa Organisasi

Mata kuliah pilihan ini diperlukan untuk membekali kemampuan dalam mengenali isu strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal organisasi dan mendiagnosa komponen internal organisasi guna merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pemahaman tentang organisasi sebagai sistem terbuka, konsep diagnosa organisasi dan proses diagnosa organisasi. Kemampuan mengenali isu strategis diperlukan agar dapat memetakan permasalahan dan mencari solusi penyelesaian masalah.

Tujuan diagnosa organisasi adalah untuk mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini (*existing*) dengan kondisi yang diinginkan. Tiga tingkatan dalam melakukan diagnosa organisasi yaitu tingkat organisasi, tingkat grup dan tingkat individu. Pemahaman isu di tingkatan yang lebih tinggi akan mempengaruhi diagnosa organisasi di tingkat bawahnya.

Dalam proyek perubahan ini, diagnosa organisasi dilakukan di tingkat organisasi untuk menyusun kerangka pikir dalam penentuan topik proyek perubahan. Diagnosa di tingkat grup dilakukan dalam mengidentifikasi rencana strategi peningkatan kompetensi pihak terdampak, khususnya untuk anggota tim. Kondisi saat ini yang pada anggota tim adalah belum dapat memberikan tampilan laporan yang mudah dibaca oleh pimpinan. Anggota tim masih sering menyampaikan laporan dalam bentuk data mentah dalam file excel. Alasan yang sering disampaikan adalah ingin melaporkan data selengkap mungkin agar tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Anggota tim kurang memahami bahwa pimpinan membutuhkan data ringkas yang dapat disampaikan dengan menarik dan mudah dalam memberikan gambaran kegiatan yang dilaporkan. Selain itu, data mentah dalam file excel tidak praktis dilihat oleh pimpinan yang menggunakan smartphone sebagai sarana penerimaan data.

Diagnosa organisasi di tingkat individu dilakukan dalam *self assesment* analisis penilaian pemetaan sikap dan perilaku serta analisis pengembangan potensi diri. Sebagai pimpinan, perpikir komprehensif diawali dengan *helicopter view* dan mengajak tim untuk bergerak bersama merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki.

G. Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan hasil penilaian sikap dan perilaku kepemimpinan yang dilakukan secara *self assesment* dan oleh mentor pada awal pelaksanaan PKN II, terdapat beberapa komponen yang berbeda nilai antara penilaian peserta sendiri dan penilaian oleh mentor. Semua sub komponen dalam kualifikasi baik dan khusus untuk sub komponen konsistensi dalam komponen integrasi memperoleh kualifikasi istimewa. Rencana strategi pengembangan diri hanya dikhususkan pada sub komponen yang berbeda antara penilaian peserta (*self assesment*) dan penilaian mentor. Rencana strategi pengembangan tersebut

mengikuti Katalog Pengembangan Sikap dan Perilaku Kepemimpinan (modul e-learning). Bukti pelaksanaan strategi pengembangan diri tersebut sebagaimana dalam Tabel 4.

Tabel 4. Bukti pelaksanaan strategi pengembangan diri

No.	Komponen/ Sub Komponen	Strategi Pengembangan	
		Pengembangan Mandiri	Pengembangan Melalui Penugasan
A.	Integritas		
	Komitmen	1. Mempelajari lebih dalam tujuan kegiatan yang ditugaskan 2. Memperkuat ketahanan dalam bekerja dengan mengatur ritme kerja periodik.	1. Pendelegasian tugas melalui monitoring melekat 2. Penugasan disertai dengan pengawasan konsistensi menjalankan tugas sesuai standar kualitas diharapkan
	Bukti	Ditugaskan menjadi SC sie forum pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan X tahun 2024 (https://bit.ly/sk-tim-gebyar). Gebyar Perbenihan diselenggarakan pada 27-29 Juli 2024 di Soreang, Kab. Bandung, Jawa barat. Sie forum harus mulai bekerja sebelum acara diselenggarakan dan bersamaan dengan pelaksanaan PKN 2. Diperlukan manajemen waktu yang baik agar keikutsertaan dalam PKN 2 dan persiapan forum Gebyar terlaksanana dengan baik. Pimpinan menyampaikan puas atas terselenggaranya 5 forum dengan peserta sebanyak 3.288 orang dan 9 klinik konsultasi perbenihan.	
B.	Kerjasama		
	Kerjasama internal	1. Mempelajari teknik komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi koordinatif yang tepat, baik secara lisan maupun tertulis dengan atasan dan anggota tim. 2. Mempelajari prosedur dan tahapan koordinasi sebagai bagian dari etika berorganisasi untuk membangun pola kerjasama yang efektif.	1. Penugasan dalam kerja tim (kontekstual/insidental) dengan pemantauan penuh pada aspek kerjasama tim. 2. Pemberian porsi atau peran tugas di lingkup kinerja unit/organisasi yang dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan pihak lain.

	Bukti	Salah satu pembelajaran teknis komunikasi adalah melalui modul Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi. Penugasan dalam panitia Gebyar Perbenihan IX sebagai SC sie forum mengharuskan melakukan pembagian tugas tim dan berkomunikasi secara intens dengan tim daerah. Kerjasama antara tim pusat dan daerah untuk menjamin semual forum dan klinik terlaksana dengan lancar.	
	Fleksibilitas	Mempelajari pola-pola membangun kebersamaan dalam tim, sehingga paham dalam mengelola interaksi yang saling memahami perbedaan.	1. Pelibatan dalam tim kerja yang melibatkan anggota dari unit lain yang memiliki perbedaan kepentingan, karakteristik pribadi, pola kerja, dan latarbelakang lainnya. 2. Penugasan untuk menjadi penyaji bidang kerja tertentu yang berhadapan dengan para pimpinan atau pemangku kebijakan untuk mengasah kemampuan persuasi.
	Bukti	Mewakili Direktur dalam talkshow yang diselenggarakan BRIN dan mewakili Direktur dalam rapat yang diselenggarakan BSIP Banten (foto dan penugasan dalam https://bit.ly/penugasan-sebagai-penyaji), bersama tim menyiapkan bahan yang akan disampaikan.	
	Komitmen dalam Tim	1. Memperbanyak keterlibatan diri dalam tim satgas yang beragam agenda kerja, sehingga menciptakan strategi mengasah komitmen pada berbagai situasi. 2. Melatih pengelolaan kerja secara pribadi, sehingga lebih mudah bergabung dalam agenda dengan target kerja bersama serta memberikan nilai lebih terhadap komitmen pribadi terhadap tim.	1. Penugasan untuk terlibat tim satuan kerja yang diberikan target kerja cukup mendesak (jangka pendek) 2. Penugasan dalam kesempatan tim yang akan menerapkan reward & punishment sehingga harus membangun komitmen.

	Bukti	Penugasan sebagai tim teknis konsolidasi harga benih padi inbrida (surat penugasan https://bit.ly/sk-tim-teknis-konsolidasi-harga-benih-padi), dimana kerja tim bersamaan dengan implementasi proyek perubahan sehingga perlu komitmen dalam pelaksanaan tugas. Tim konsolidasi harga memiliki waktu kerja yang terbatas sejak ditugaskan pada 1 Juli 2024 dan harus menetapkan hasil pada 14 September 2024.	
C.	Mengelola Perubahan		
	Pelayanan publik	Mempelajari konsep-konsep dasar pelayanan prima dalam sektor publik sesuai dengan proses bisnis di Dit. Perbenihan	1. Penugasan dalam satuan tugas yang relevan dengan upaya peningkatan atau inovasi penyelenggaraan pelayanan publik di Dit. Perbenihan. 2. Penugasan dalam tim yang melakukan proses bisnis layanan kepada pemangku layanan.
	Bukti	Direktur Perbenihan memberikan penugasan sebagai koordinator tim penghubung penanggung jawab kegiatan antisipasi darurat pangan tahun 2024 (surat penugasan https://bit.ly/sk-tim-penghubung-pj-antisipasi-darurat-pangan). Tim ini dibentuk sebagai salah satu bentuk pelayanan Dit. Perbenihan kepada PJ Antisipasi Darurat Pangan dari eselon 1 lain terkait pengadaan bantuan benih. Koordinator harus menghubungi setiap PJ wilayah yang berasal dari eselon 1 lain. Penugasan lain adalah menjadi anggota tim monev kegiatan bantuan pemerintah Dit. Perbenihan (https://bit.ly/sk-tim-monev-banpem).	
.	Pengembangan orang lain	Mengenali potensi diri melalui pemetaan diri untuk kemudian membuat rencana pengembangan potensi sesuai minat dan ukuran kapasitas diri yang relevan dengan target.	Penugasan sebagai ketua tim satuan tugas tertentu yang terdiri atas berbagai karakter anggota, target jangka pendek sehingga mengasah kemampuan membagi tugas sesuai kompetensi.
	Bukti	SC sie Forum dalam Tim Gebyar (https://bit.ly/sk-tim-gebyar), koordinator dalam tim penghubung penanggung jawab kegiatan antisipasi darurat pangan (https://bit.ly/sk-tim-penghubung-pj-antisipasi-darurat-pangan)	

Keberhasilan penerapan strategi pengembangan diri selama mengikuti PKN II ini dapat dilihat pada peningkatan hasil penilaian pemetaan sikap dan perilaku setelah mengikuti PKN II adalah sebagaimana Gambar 11. Terjadi peningkatan nilai rata dari 7,66 (Gambar 11a) menjadi 8,73 (Gambar 11b).

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Dina, S.TP., M.Si	Nama Mentor	: Dr. Ir. Suwandi, M.Si		
NIP	: 197504251999032000	NIP:	: 196703231992031003		
Jabatan	: Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	Jabatan	: Direktur Jenderal		
Instansi	: Dit. Perbenihan Tanaman Pangan, Ditj	Instansi	: Direktorat Jenderal Tanaman Pa		
Program	: PKN Tk. II Angkatan X Tahun 2024				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	8	8,00	Baik
	Komitmen	8	7	7,30	Baik
	Kedisiplinan	8	8	8,00	Baik
	Kejujuran	8	8	8,00	Baik
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	7	7	7,00	Baik
	Rata-Rata	8,00	7,83	7,88	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	7	7,30	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8,00	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8	7	7,30	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	8	8,30	Baik
	Rata-Rata	8,20	7,60	7,78	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	7	7,30	Baik
	Adaptabilitas	7	7	7,00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	7	7,30	Baik
	Orientasi pada hasil	7	7	7,00	Baik
	Inisiatif	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	7,60	7,20	7,32	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,93	7,54	7,66	Baik

(a)

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Dina, S.TP., M.Si	Nama Mentor	: Dr. Yudi Sastro, SP., MP.		
NIP	: 197504251999032000	NIP:	: 197207021998031002		
Jabatan	: Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	Jabatan	: Direktur Jenderal		
Instansi	: Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan,	Instansi	: Direktorat Jenderal Tanaman		
Program	: PKN Tk. II Angkatan X Tahun 2024				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	8	8,30	Baik
	Rata-Rata	9,00	8,83	8,88	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9,00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	9	9,00	Istimewa
	Komunikasi	9	8	8,30	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	8,80	8,60	8,66	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	8	8,00	Baik
	Adaptabilitas	9	8	8,30	Baik
	Pengembangan orang lain	9	9	9,00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9,00	Istimewa
	Inisiatif	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	8,80	8,60	8,66	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,87	8,68	8,73	Baik

(b)

Gambar 11. Peningkatan hasil penilaian pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketersediaan benih padi bersertifikat belum dapat memenuhi kebutuhan secara nasional dan produksi benih masih sangat rendah di sebagian besar luar Pulau Jawa menunjukkan perlunya strategi tambahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan. Untuk itu disusun proyek perubahan ini dengan judul 'Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa'. Akselerasi ini dibutuhkan karena kegiatan untuk mendukung kemandirian benih padi sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016, tetapi belum memperoleh hasil yang optimal. Output dari proyek perubahan ini adalah pedoman bimbingan teknis untuk pembinaan produsen benih, bertambahnya produsen yang aktif memproduksi benih dan bertambahnya ketersediaan benih padi in-situ.

Output utama dalam jangka pendek dapat tercapai yaitu terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 104/HK.310/C/9/2024 tentang Pedoman Pembinaan Produsen Benih Tanaman Pangan. Pedoman pembinaan ini merupakan keterbaruan karena sebelumnya belum ada pedoman yang mengatur kurikulum pembinaan. Selain itu, sasaran pelaksanaan pedoman di jangka menengah juga sudah disiapkan yaitu kelompok tani calon produsen benih yang melaksanakan kegiatan mandiri benih tanaman pangan tahun 2024 dan produsen benih kecil di Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Utara.

Keberlanjutannya proyek perubahan ini telah dijamin dengan dialokasikannya anggaran dalam PAGU SBPI 2025 untuk program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan untuk penangkaran mandiri benih in-situ seluas 1.900 ha. Dari sisi efisiensi anggaran pemerintah, apabila bantuan benih padi dapat disediakan secara in-situ maka dapat dihemat biaya ongkos kirim hingga 79% dari alokasi biaya ongkos kirim yang disediakan untuk 12.125 ton benih pada PAGU SPBI 2025.

Proses pengembangan diri selama PKN 2 ini berhasil meningkatkan nilai sikap dan perilaku dari yang sebelumnya rata-rata 7,66 menjadi 8,73. Selain itu personel terdekat di lingkungan kerja juga memperoleh manfaat peningkatan pengetahuan dan kompetensi dengan menjadi anggota tim pelaksana.

B. Hikmat Pembelajaran

1. Dari proyek perubahan

Dalam penyusunan Rancangan Proyek Perubahan (RPP) pelajaran yang dipetik adalah ketepatan dalam menentukan penyebab dan analisis penyebab sangat penting untuk dapat menentukan solusi yang akan diambil. Penentuan isu strategis merupakan langkah awal untuk menentukan masalah.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan, sosialisasi perubahan yang akan dilakukan merupakan langkah awal yang penting untuk memperoleh dukungan, baik dari para pemangku kepentingan maupun dari tim pelaksana. Terlebih dampak dari proyek perubahan ini belum akan terlihat pada jangka pendek.

Menerima saran dan kritik atas pekerjaan yang sudah dilakukan dengan usaha yang banyak, membutuhkan kebesaran hati dan keterbukaan pemikiran. Draft pedoman yang sudah disusun dengan cermat, ternyata dari sudut pandang lain menjadi kurang sesuai. Kesamaan cara pandang adalah hal yang harus ditempuh terlebih dahulu, sehingga diskusi selanjutnya menjadi lebih terarah dan mencapai kesepakatan.

Manajemen waktu dalam melaksanakan beberapa kegiatan sekaligus sangat diperlukan. Koordinasi yang baik dan cara komunikasi yang efektif dalam tim juga menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini, khususnya dalam pencapaian tujuan jangka menengah.

2. Dari PKN II

Pelatihan Kepemimpinan Nasional II (PKN II) ini memberikan banyak sekali tambahan pengetahuan dan pengalaman yang dapat memperkaya kompetensi diri. Sebagian besar materi memang dibutuhkan untuk pengayaan seorang pemimpin, tetapi terdapat pula materi yang dibutuhkan

oleh semua ASN seperti materi tentang integritas dan energi kepemimpinan serta resiliensi diri. Sangat sesuai bila kebijakan LAN memperkenankan pejabat fungsional madya untuk mengikuti PKN II ini dan tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat tinggi pratama (eselon 2).

Sebelum mengikuti PKN II ini, pelatihan yang sering saya ikuti lebih banyak ke aspek teknis khususnya tentang perbenihan. Dari PKN II ini banyak pengetahuan tentang aspek manajemen yang saya pelajari, yang dapat menjadi bekal tambahan dalam menyusun saran dan rekomendasi terkait dengan kebijakan dan kegiatan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya Direktorat Perbenihan.

Pelaksanaan PKN II yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian berkerja sama dengan Lembaga Administrasi Nasional dan diikuti oleh personel dari Kementerian Pertanian sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Koordinasi Perekonomian, Badan Pangan Nasional, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Negara dan beberapa Dinas Kabupaten/Kota, merupakan kolaborasi yang sangat baik. Ternyata banyak hal yang dapat dikolaborasikan untuk mencapai tujuan masing-masing organisasi. Jaringan yang terbentuk akan bermanfaat untuk koordinasi dan kolaborasi selanjutnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

C. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan pelaksanaan proyek perubahan Akselerasi Kemandirian Benih Padi In-Situ di Luar Pulau Jawa, rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Untuk menyempurnakan pedoman pembinaan, perlu dilengkapi dengan modul pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Lebih baik modul yang terkait dengan regulasi disusun setelah revisi regulasi perbenihan 2018 sudah terbit. Penyusunan modul dapat bekerja sama dengan instansi yang menjadi narasumber.
2. Apabila keberlanjutan proyek perubahan untuk meningkatkan produksi benih padi in-situ telah dijamin melalui alokasi anggaran dalam PAGU SBPI 2025, maka pembinaan produsen benih juga perlu memperoleh perhatian

khusus. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam penyediaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.

3. Komitmen Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perlu dijaga agar program kemandirian benih padi in-situ di luar Pulau Jawa ini tetap terlaksana di tahun-tahun mendatang, terlebih sudah didukung oleh Bappenas.

Dari pengalaman mengikuti PKN II ini, beberapa hal yang disarankan adalah:

1. Kepada LAN, agar modul pelatihan dibuat dengan lebih struktur yang seragam dan standard, sehingga antara modul yang satu dengan modul yang lain tidak berbeda tata cara penulisannya.
2. Sebaiknya olahraga pagi selalu dilaksanakan pada saat pembelajaran klasikal dengan waktu sekitar 30 menit. Olahraga pagi lebih penting dibandingkan apel.
3. Dikarenakan Ciawi sekarang tidak sesejuk dahulu dan tidak tersedia ventilasi yang memadai apabila jendela ditutup, kepada BBPMKP disarankan untuk melengkapi kamar dengan AC atau minimal dengan kipas angin atau *exhaust fan*.

_____10092024_____

DAFTAR REFERENSI

1. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. 2021. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BPSB-BBI tahun 2021.
2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. 2022. Hasil Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan-P3BTP tahun 2021-2022. Bahan Tayang dalam Rakor Evaluasi.
3. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. 2023. Hasil Inventarisasi Produsen Benih Yang Terdaftar Di BPSB Tahun 2022-2023 (tidak dipublikasikan).
4. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. 2023. Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan tahun 2023 (tidak dipublikasikan).
5. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. 2023. Rekapitulasi Laporan Sertifikasi Benih BPSB Dan Produsen Benih Yang Disertifikasi Oleh LSSM (tidak dipublikasikan).
6. Hasil Uji Kompetensi Pengawas Benih Tanaman Periode April 2024. <https://fungsional.pertanian.go.id/ujiampil/user/peserta.html#>
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 jo. 465/HK.220/C.02/2023 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
9. Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sektor Pertanian
11. Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit. <https://linebank.co.id/blog/general/apasih-prinsip-5c-dalam-pemberian-kredit-yuk-kenali-lebih-jauh/>.
12. *Training Manual Seed Producers Cooperatives* yang digunakan oleh CDI Wageningen dalam pelatihan *Integrated Seed System Development*
13. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan